

**ANALISIS HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS ATAS BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Oleh :  
Fahri Eka Oktora  
Winston Pontoh**

***ABSTRACT***

*Local governments need to increase capital investment in fixed assets, such as: equipments, buildings, infrastructures, and other fixed assets. Capital expenditure allocation was based on the local needs for facilities and infrastructure. The higher level of capital investment expected to improve the quality of public services, because the fixed assets due to capital expenditure is a key for the implementation of governmental duties and provides services to the public.*

*This study was aimed at analyzing the corelations of local own revenues, general allocation funds, and specific allocation funds with capital expenditures at Tolitoli Regency in Central Sulawesi Province. Research design methods is the field research by correlation analysis.*

*Test results showed a lack relationship between local own revenues with capital expenditures by R value was 0,155. Meanwhile the relationship between general allocation funds with capital expenditures was 0,981 and special allocation funds with capital expenditures was 0,427. It shows the close relationship between the two variables with capital expenditures.*

**Keywords:** *Local Own Revenue, General Allocation Fund, Spesific Allocation Fund, Capital Expenditure.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Jika kita menelusuri sejarah, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sebenarnya bukan merupakan konsep baru karena telah diatur sejak tahun 1903 dimana pemerintah kolonial mengeluarkan *Staatsblaad* Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan dengan pengelolaan keuangan yang berdiri sendiri. Akan tetapi, desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antar daerah (Zulyanto, 2010). Pada masa orde baru, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan pemerintah bersamaan dengan kontrol yang ketat terhadap militer dan birokrasi, sehingga pada akhirnya relasi pusat-daerah periode orde baru lebih cenderung bergerak ke arah kutub sentralisasi daripada desentralisasi. Kebalikannya, otonomi daerah yang dilahirkan orde reformasi terlibat lebih nyata namun cenderung membawa dampak negatif dibandingkan orde baru. otonomi daerah ala orde baru tidak memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah, sehingga tidak pernah terjadi sengketa antara pemerintah pusat dengan daerah.

Saat ini, otonomi daerah memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada daerah otonom, yang ditekankan pada kabupaten dan kota. Dampaknya, apabila merasa diambil haknya pemerintah daerah berani 'memberontak' kepada pemerintah pusat lewat pengadilan. Pada tahun 2003, Gelora Bung Karno (GBK), yang terletak di kawasan Senayan, disengketakan hak pengelolanya oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Sutiyoso, selaku Gubernur DKI Jakarta menganggap bahwa GBK harus dikelola oleh Pemda DKI Jakarta. Sementara Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri selaku Pemerintah, tidaklah demikian menafsirkannya. Dengan mengelola GBK, Sutiyoso menganggap bahwa Pemda DKI akan mendapatkan keuntungan ekonomis. Pernyataan Sutiyoso ini menanggapi pernyataan Mendagri Hari Sabarno, yang menyebutkan bahwa aset Pemerintah tidak dapat dimiliki oleh pemerintah daerah karena merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Hasil riset yang dilakukan oleh Adi (2006) mengindikasikan bahwa proporsi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingginya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat. Fakta ini tidak mencerminkan timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil (Harianto dan Priyo, 2010).

Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik. Dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan

infrastruktur daerah tersebut dikenal dengan istilah belanja modal (Permendagri No. 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Berbagai fenomena yang terjadi seputar tarik-menarik aset antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat memotivasi untuk dilakukannya suatu riset dalam rangka mencari tahu apakah aset tetap pemerintah daerah selama ini telah dibelanjakan dengan ‘uang sendiri’ ataukah didanai oleh bantuan dari pemerintah pusat? Oleh karena itu, judul yang diangkat adalah: “Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk berikut ini.

1. Bagaimana hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?

Adapun tujuan penelitian adalah berikut ini.

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian juga diharapkan dapat memberikan manfaat berikut ini.

1. Secara teoritis memberikan kontribusi positif dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik.
2. Secara praktis, memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar, terutama yang terkait dengan sumber pendanaan belanja modal (pengadaan aset tetap).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Tempat atau Obyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dengan kriteria SKPD yang memiliki alokasi Belanja Modal selama tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011.

#### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan teknik data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari berikut ini.

##### 1) Jenis Data

- (1) Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, seperti proses pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka, seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

## 2) Sumber data

- (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan obyek penelitian.
- (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang bersumber dari obyek penelitian ini.

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tolitoli.

## 2. LANDASAN TEORITIS

### 2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yang berarti mekanisme teknik analisis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2002).

### 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah suatu anggaran daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun (Halim, 2004).

### 2.3 Laporan Keuangan Sektor Publik

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

### 2.5 Dana Alokasi Umum

DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

### 2.6 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

### **2.7 Belanja Modal**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005).

### **2.8 Barang Milik Daerah**

Menurut Abdullah (2010) Barang Milik Daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD.

### **2.9 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal**

Prakosa (2004) mengutip riset yang dilakukan oleh Aziz *et al.* (2000), Doi (1998), Von Furstenberg *et al.* yang mengajukan hipotesis bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah (*tax spend hypothesis*). Hoover & Sheffrin (1992) yang dikutip oleh Prakosa (2004) secara empiris menemukan bahwa pada pertengahan 1960-an pajak berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedang untuk sampel sesudah tahun 1960-an menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian Prakosa (2004) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan jika PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

### **2.10 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal**

Dalam penelitiannya, Holtz-Eakin *et al.* (1994) yang dikutip oleh Abdullah dan Halim (2006) menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Halim dan Abdullah (2004) serta Prakosa (2004) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dalam hal ini DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

### **2.11 Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal**

Riset Muis (2012) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

## **3. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN/KASUS**

Tolitoli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang nampak memanjang dari timur ke barat Pulau Sulawesi, terletak di sebelah utara garis khatulistiwa dalam koordinat 0,35°-1,20° LU dan 120°-122,09° BT dengan luas 4.079,6 km<sup>2</sup> serta penduduk 210.000 jiwa (2008). Pada tahun 2011, kondisi perekonomian Kabupaten Tolitoli meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, serta terciptanya laju pertumbuhan PDRB yang positif.

Pengukuran dan Pelaporan PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual based accounting*). Entitas akuntansi (*accounting entity*) adalah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tolitoli, sedangkan entitas pelaporan (*reporting entity*) adalah Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tolitoli.

#### 4. ANALISIS DAN EVALUASI

##### 4.1 Analisis Data

##### 4.1.1 Analisis PAD Kabupaten Tolitoli

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran PAD berikut ini.

**Tabel 4.1 Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi PAD**

Tahun	PAD (Rp.)	Kenaikan (Penurunan) (Rp.)	%
2007	14.842.616.597,86	-	-
2008	14.402.120.403,95	(440.496.193,91)	(2,97)
2009	19.676.781.670,96	5.274.661.267,01	36,62
2010	13.131.984.312,31	(6.544.797.358,65)	(33,26)
2011	16.655.710.599,85	3.523.726.287,54	26,83
Rata-rata	15.741.842.717,00		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2011)

Pada Tahun Anggaran 2010 PAD mengalami penurunan karena masih banyaknya potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal, badan usaha milik daerah belum memberikan bagian laba kepada pemerintah daerah dan masih kurangnya kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, masih terdapat kebocoran-kebocoran yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman atas penatausahaan penerimaan daerah oleh aparat pemungut karena belum memenuhi kompetensi yang disyaratkan.

Pada Tahun Anggaran 2011, realisasi PAD mengalami kenaikan dikarenakan adanya sarana mobilitas (kendaraan dinas) bagi petugas guna meningkatkan pembinaan kepada para wajib pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga akan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

##### 4.1.2 Analisis DAU Kabupaten Tolitoli

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran DAU berikut ini.

**Tabel 4.2 Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi DAU**

Tahun	DAU (Rp.)	Kenaikan (Penurunan) (Rp.)	%
2007	274.713.000.000,00	-	-
2008	304.613.239.000,00	29.900.239.000,00	10,88
2009	307.431.914.000,00	2.818.675.000,00	0,93
2010	319.134.358.000,00	11.702.444.000,00	3,81
2011	351.739.677.810,00	32.605.319.810,00	10,22
Rata-rata	311.526.437.762,00		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2011)

Realisasi DAU Kabupaten Tolitoli cenderung naik setiap tahunnya secara signifikan. Peningkatan ini terjadi karena Pemerintah Pusat memberikan dana yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

##### 4.1.3 Analisis DAK Kabupaten Tolitoli

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran DAK berikut ini.

**Tabel 4.3 Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi DAK**

Tahun	DAK (Rp.)	Kenaikan (Penurunan) (Rp.)	%
2007	41.638.325.274,00	-	-
2008	51.226.000.000,00	9.587.674.726,00	23,02

2009	47.440.000.000,00	(3.786.000.000,00)	(7,39)
2010	39.445.400.000,00	(7.994.600.000,00)	(16,85)
2011	47.497.500.000,00	8.052.100.000,00	20,41
Rata-rata	45.449.445.055,00		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2011)

DAK mengalami penurunan pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009, namun mengalami kenaikan pada tahun 2011. Fluktuasi dana ini di luar kewenangan Pemerintah Daerah sebab penetapan besaran DAK dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

#### 4.1.4 Analisis Belanja Modal Kabupaten Tolitoli

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran belanja modal berikut ini.

**Tabel 4.4 Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal**

Tahun	Belanja Modal (Rp.)	Kenaikan (Penurunan) (Rp.)	%
2007	150.893.400.666,00	-	-
2008	148.234.903.652,00	(2.658.497.014,00)	(1,76)
2009	115.759.328.234,00	(32.475.575.418,00)	(21,91)
2010	56.727.557.270,00	(59.031.770.964,00)	50,99
2011	118.894.665.866,00	62.167.108.596,00	109,59
Rata-rata	118.101.971.137,60		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2011)

Belanja modal mengalami penurunan dalam periode tahun 2009-2010 sebagai dampak dari pengalokasian hampir 75% dana yang ada untuk belanja operasi diantaranya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga. Namun pada tahun anggaran 2011 mengalami kenaikan karena dana yang tersedia pada APBD tahun berjalan diprioritaskan untuk pengadaan aset tetap.

#### 4.1.5 Analisis Korelasi Bivariate

Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS 19.0 diperoleh hasil uji korelasi *bivariate* antara PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal berikut ini.

##### Correlations

		PAD	DAU	DAK	BM
PAD	Pearson Correlation	1	.522**	.646**	.340**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	255	255	255	255
DAU	Pearson Correlation	.522**	1	.574**	.953**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	255	255	255	255
DAK	Pearson Correlation	.646**	.574**	1	.545**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	255	255	255	255
BM	Pearson Correlation	.340**	.953**	.545**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	255	255	255	255

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji korelasi, nilai R dari hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal adalah 0,340 (34%) sehingga terdapat hubungan yang kurang erat antara kedua variabel tersebut. Hubungan antara PAD dengan DAU memiliki nilai 0,522 (52,2%), sedangkan hubungan antara PAD dengan DAK sebesar 0,646 menunjukkan eratnya korelasi antara kedua variabel tersebut.

Hubungan DAU dengan Belanja Modal masuk dalam kategori kuat senilai 0,953 (95,3%). Di sisi lain, terdapat hubungan yang cukup erat antara DAU dengan PAD sebesar 0,522. DAU dengan DAK memiliki tingkat keeratan senilai 0,574 sebab kedua variabel ini bersumber dari pos yang sama, yaitu APBN.

Korelasi antara DAK dengan Belanja Modal senilai 0,545 (54,5%) sehingga terdapat hubungan yang erat antara kedua variabel tersebut. Selain itu, DAK berkorelasi dengan PAD sebesar 0,646 (64,6%), sedangkan hubungan antara DAK dengan DAU cukup kuat dengan nilai 0,574 karena kedua sumber dana ini berasal dari Pemerintah Pusat guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2 Evaluasi Data**

Hubungan antara PAD dengan Belanja Modal diklasifikasikan dalam kategori lemah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian Hoover & Sheffrin (1992) dalam Prakosa (2004) yang secara empiris menemukan bahwa sesudah tahun 1960-an pajak tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kebijakan alokasi wajib (*earmarking*) yang termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat 'memaksa' daerah dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang tertentu. Akan tetapi, obyek penelitian belum menerapkan aturan tersebut pada tahun anggaran 2011. Misalnya, belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan seharusnya dibiayai oleh 10% dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai komponen dari PAD.

Korelasi DAU dan Belanja Modal masuk dalam kategori kuat. Semakin besar DAU, maka Belanja Modal diprediksi akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Holtz-Eakin *et.al.* (1994), Legrenzi & Milas (2001) yang dikutip oleh Prakosa (2004), Abdullah dan Halim (2006), serta Susilo dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Hubungan antara variabel DAK dan Belanja Modal masuk dalam kategori kuat. Kenyataan ini mendukung riset Muis (2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berhubungan dengan Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung studi Abdullah dan Halim (2006) yang menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal terkait dengan sumber pendapatan atau pendanaan yang tersedia. Besaran belanja modal berasosiasi dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, tapi tidak dengan pendapatan sendiri (PAD).

Implikasi akuntansi dari hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa tiap-tiap dana harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah dimana beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dari laci lainnya. Langkah ini merupakan perwujudan dari salah satu teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh sektor publik, yaitu akuntansi dana. Williams dalam Abdullah (2010) turut menegaskan bahwa salah satu tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dalam mencocokkan aliran masuk dengan aliran keluar kas sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dokumen penganggaran dan penatalaksanaan keuangan daerah harus mencantumkan sumber pendanaan yang jelas dari setiap jenis belanja (termasuk belanja modal) guna menghindari ketekoran kas akibat pengeluaran yang tidak direncanakan dalam anggaran.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, analisa hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan berikut ini.

1. Hasil uji korelasi PAD dengan Belanja Modal menunjukkan terdapat hubungan yang kurang erat akibat rendahnya proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah. Kebijakan alokasi wajib

(*earmarking*) dalam UU No. 28 Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di bidang tertentu walaupun obyek penelitian belum menerapkan aturan tersebut.

2. Hubungan antara DAU dengan Belanja Modal adalah sangat erat. Hal ini ditunjang oleh pemberian DAU dalam jumlah banyak sehingga memiliki proporsi yang dominan dalam membiayai belanja modal.
3. DAK dengan Belanja Modal menunjukkan hubungan yang erat. Realita ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer, khususnya dalam pengadaan aset tetap pada proyek tertentu yang urusannya diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian berimplikasi teoritis pada studi Abdullah dan Halim (2006) bahwa pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal terkait dengan sumber pendanaan yang tersedia. Implikasi akuntansi dari hasil penelitian ini sejalan pula dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa tiap-tiap dana harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah dimana beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dari laci lainnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan perbandingan antara kondisi ideal pada landasan teori dengan kondisi nyata sesuai pembahasan hasil penelitian maka disarankan hal-hal berikut ini.

1. Pemda Kab. Tolitoli hendaknya meningkatkan realisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.
2. Pemda Kab. Tolitoli seyogyanya mengimplementasikan amanat UU No. 28/2009 untuk mengalokasikan 10% dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor guna membiayai belanja modal pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dilakukannya generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Penelitian berikutnya juga diharapkan menggunakan variabel yang lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain (ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan lainnya), maupun variabel nonkeuangan, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2010. Manajemen Kas Daerah. diakses dari <http://syukriy.word-press.com> pada tanggal 9 Juli 2012.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* (Vol. 2 No. 2 November 2006) Halaman 17-32.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal* disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX di Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Kabupaten Tolitoli dalam Angka Tahun 2011.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal* disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2010. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Jurnal yang disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat*. Yogyakarta: Andi.
- Muis, Noni Hilwa. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8 No. 2, Hal. 101-118*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- \_\_\_\_\_. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Surabaya: Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama.
- Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.